

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan dan penelitian di atas maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Faktor Pendukung dalam Penanganan Kasus Korupsi di Kejaksaan Negeri Kota Cirebon (2019 – 2024) penerapan digitalisasi administrasi perkara juga berperan besar dalam mempercepat proses penyidikan dan meningkatkan transparansi kerja. Secara keseluruhan, kombinasi antara komitmen internal, koordinasi antar lembaga, pemanfaatan teknologi, dan partisipasi publik menjadi kunci utama dalam meningkatkan efektivitas penanganan kasus korupsi di Kejaksaan Negeri Kota Cirebon.
2. Faktor Penghambat dalam Penanganan Kasus Korupsi di Kejaksaan Negeri Kota Cirebon (2019 – 2024) sulitnya mencari dan membuktikan alat bukti, keterbatasan jumlah dan keahlian teknis jaksa, birokrasi antar lembaga yang rumit, minimnya anggaran serta fasilitas pendukung, dan kurangnya perlindungan bagi penyidik. Hambatan-hambatan tersebut membuat proses penyidikan dan pembuktian berjalan lambat. Untuk mengatasinya, perlu peningkatan kompetensi SDM, penyederhanaan koordinasi antar lembaga, penambahan anggaran, serta penguatan perlindungan bagi aparat penegak hukum.
3. Dalam upaya mengatasi berbagai hambatan penanganan kasus korupsi di Kejaksaan Negeri Kota Cirebon, dibutuhkan langkah-langkah strategis yang menyentuh aspek sumber daya manusia, sistem kerja, dan dukungan kelembagaan. Peningkatan kapasitas SDM melalui pelatihan teknis menjadi kunci agar jaksa dan penyidik memiliki kemampuan yang memadai dalam menangani kasus yang kompleks. Selain itu, penguatan kerja sama antar lembaga melalui perjanjian resmi dapat mempercepat proses akses data dan mengurangi hambatan birokrasi. Dukungan anggaran dan teknologi juga perlu ditingkatkan agar penyidikan lebih efektif dan akurat. Di sisi lain, perlindungan bagi aparat serta penerapan budaya integritas dan transparansi

internal penting untuk menjaga profesionalitas serta keberanian dalam menjalankan tugas. Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan penanganan kasus korupsi di Kejaksaan Negeri Kota Cirebon dapat berjalan lebih optimal dan efisien.

B. Saran

Berdasarkan pembahasan dan hasil penelitian di atas maka ada beberapa saran yang diajukan penulis sebagai berikut

1. Kejaksaan Negeri Kota Cirebon diharapkan dapat terus mempertahankan serta mengembangkan sistem digitalisasi administrasi perkara dan koordinasi antarbidang. Hal ini penting untuk menjaga efektivitas dan transparansi dalam proses penanganan kasus korupsi di masa mendatang.
2. Perlu adanya peningkatan kapasitas sumber daya manusia, khususnya bagi jaksa yang menangani perkara korupsi, melalui pelatihan teknis dan pengembangan kompetensi. Selain itu, dukungan anggaran dan sarana prasarana yang memadai juga diperlukan agar proses penyidikan dapat berjalan lebih optimal.
3. Hendaknya Kejaksaan Negeri Kota Cirebon memperkuat kerja sama lintas lembaga, seperti dengan PPATK, BPK, dan Kepolisian, untuk mempercepat akses data dan memperkuat pembuktian perkara. Selain itu, diperlukan peningkatan perlindungan bagi aparat penegak hukum guna menjamin keamanan serta independensi dalam menjalankan tugas.